SINOMIKA JOURNAL
PUBLIKASI ILMIAH BIDANG EKONOMI & AKUNTANSI
ISSN (e): 2829-9701

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak Ilegal

The Effect of Modernization of the Tax Administration System and the Implementation of Good Corporate Governance on Illegal Tax Avoidance

Novika Lia Syafitri[1], Syamsu Rizal[2]
Universitas Bandar Lampung
Email: novika.18025002@student.ubl.ac.id[1], syamsu.rizal@yahoo.co.id[2]

Abstract

Most of the tax revenue is used as the mainstay of state revenue from corporations large. The large number of Bandar Lampung corporations is likely to increase tax revenues, but unfortunately there are common ground corporations to do tax evasion illegally. The survey is aimed at analyzing and showing reality due to the modernization of the tax administration system and the implementation of GCG on illegal tax avoidance. examination was carried out at the KPP Bandar Lampung 1. The use of the subject of investigation it means taxpayers registered with KPP Bandar Lampung 1. The survey used a quantitative method, the technique of collecting data in the survey was in the form of distributing surveys via google form. Determination of the sample in the survey using purposive sample and includes 30 issuers. Hypothesis testing technique is done using t and f. Statistical analysis that used is SPSS V17. The result of the survey shows that the modernization of the tax administration system has a positive impact on sig. 0.043 and has a positive impact on the regression coefficient of 0.737. The implementation of GCG is positively affected and is significant with sig. 0.032, and positively affected by a regression coefficient of 0.627. Simultaneously 2 variables have an impact on illegal tax evasion in taxpayers registered with KPP Pratama Bandar Lampung 1.

***Keywords**: Modernization of Tax Administration System, Implementation of Good Corporate Governance, Ilegal Tax Avoidance*

Abstrak

Sebagian besar penerimaan pajak dipergunakan sebagai andalan penerimaan negara dari korporasi besar. Banyaknya korporasi Bandar Lampung kemungkinan besar akan menaikkan penerimaan pajak, tetapi sayangnya terdapat kesamaan korporasi untuk melakukan penghindaran pajak secara ilegal. Survei tertujukan untuk menganalisis serta menunjukan secara realitas akibat modernisasi sistem administrasi perpajakan serta penerapan GCG pada penghindaran pajak ilegal. Pemeriksaan ini dilakukan di KPP Bandar Lampung 1. Penggunaan subjek investigasi artinya wajib pajak terdaftar pada KPP Bandar Lampung 1. Survei tersebut memakai metode kuantitatif, teknik pengumpulan data pada survei berupa penyebaran survei melalui google form. Penentuan sample pada survei memakai sample purposive dan mencakup 30 emiten. Teknik pengujian hipotesis dilakukan menggunakan t serta f. Analisis statistik yang dipergunakan ialah SPSS V17. Akibat survei memberikan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan terdampak positive pada sig. 0,043, serta terdampak positive pada koefisien regresi 0,737. Penerapan GCG terpengaruh positive serta tersignifikansi dengan sig. 0,032, serta terdampak positive koefisien regresi 0,627. Secara bersamaan ke-2 variable tersebut mempunyai dampak simultan pada penghindaran pajak illegal di wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Bandar Lampung 1.

Kata kunci: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Penerapan Good Corporate Governance, Penghindaran Pajak Ilegal

Novika Lia Syafitri[1], Syamsu Rizal[2]
DOI: https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i4.423

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sektor pendapatan pemerintah paling krusial dari banyak sekali jenis emiten besar. Banyaknya badan usaha yang terdapat di Kota Bandar Lampung dibutuhkan bisa mempertinggi penerimaan pajak, tetapi sayangnya ada kesamaan badan usaha ilegal menghindari pajak. Memakai cara tak legal untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak. Diduga penggelapan pajak atau penggelapan Rp 110 triliun dilansir www.voice.com (2018). Lebih kurang 80% pelaku praktik penghindaran pajak ini ialah korporasi Penghindaran pajak sangat merugikan Negara. Sebagai akibatnya penerimaan negara serta penerimaan pajak penerimaan bisa dikurangi acara modernisasi sistem administrasi perpajakan terbaru melalui pengembangan SAPT dikendalikan oleh sistem manajemen perkara menggunakan modul otomatisasi serta layanan berbasis E-System (e-SPT, e-Filling), e-Payment, Rekening harus Pajak, e-pendaftaran, e-konsultasi).

Modernisasi perpajakan menggunakan pelayanan baik serta penerapan GCG seharusnya meningkatkan kejujuran serta kepercayaan perpajakan pada administrasi perpajakan. Secara awam rapikan kelola emiten yang baik adalah suatu struktur diterapkan oleh emiten supaya bisa berkembang serta lebih mempertinggi kinerjanya sesuai aturan serta nilai-nilai etika.salah satu penyebab penghindaran pajak artinya lemahnya rapikan kelola emiten pada pada emiten. Emiten ialah wajib pajak, sebagai akibatnya pengaturan struktur tata kelola emiten serta modernisasi sistem administrasi perpajakan mensugesti cara emiten memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya, namun pada sisi lain, perencanaan pajak tergantung pada aplikasi tata kelola emiten asal emiten. Dalam riset ini penulis menentukan rumusan masalah yakni

Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan serta penerapan good corporate governance berpengaruh terhadap tindakan perusahaan untuk tidak melakukan penghindaran pajak ilegal Riset ini bertujuan yaitu guna menganalisis dan mendapatk an bukti bahwa pengaruh Modernisasi sistem administrasi perpajakan ,serta penerapan good corporate governance terhadap penghindaran pajak ilegal.Sebuah usaha merupakan Wajib Pajak sehingga kenyataannya bahwa suatu aturan struktur corporate governance dan modernisasi sistem administrasi perpajakan mempengaruhi cara suatu usaha guna memenuhi serta melaksanakan kewajiban pajaknya, namun di sisi lain perencanaan pajak bergantung pada pelaksanaan corporate governance dalam suatu perusahaan.

Tabel 1. Data Jumlah Wajib Pajak Badan dan PPH 21 tahun 2016-2020

Year	Total Wp Badan Terdaftar	Penerimaan PPh (Rp)	Realisasi	Percentage
2016	3818 (sd 2016)	117.623.501.447	976.352.611.292	12,05%
2017	369	126.536.869.170	954.722.359.220	13,25%
2018	446	140.163.728.676	1.14.286.061.205	12,58%
2019	590	147.950.741.892	1.093.074.968.090	14,24%
2020	610	140.434.996.752	794.675.332.843	17,67%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung 1 2021

SINOMIKA JOURNAL
PUBLIKASI ILMIAH BIDANG EKONOMI & AKUNTANSI
ISSN (e): 2829-9701

Sesuai tabel di atas diperoleh berita bahwa selama lima tahun terakhir dari 2016-2020 total wajib pajak serta penerimaan pajak penghasilan orang eksklusif masih terus semakin besar, tetapi penerimaan pajak penghasilan orang eksklusif mengalami penurunan di 2020, yaitu jumlah wajib pajak terus semakin tinggi semakin semakin besar. Sebagai akibatnya masih ada beberapa emiten mencoba melakukan penghindaran pajak secara ilegal menggunakan banyak sekali cara.

KAJIAN PUSTAKA

Pajak memiliki arti krusial diatur pada UU RI Nomor 28 2007 Pasal 21, yaitu iuran harus pada negara terutang orang eksklusif atau badan aturan serta harus sesuai UU, serta tidak eksklusif mendapatkan imbalan serta dipergunakan buat kepentingan negara. Tujuannya untuk kemaslahatan umat. Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak (2011) mengungkapkan pada bukunya bahwa terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair atau pajak menjadi asal dana bagi negara buat mendanai pengeluarannya serta fungsi pajak buat mengatur secara regular, ataupun melaksanakan kebijakan pemerintah pada bidang sosial serta ekonomi.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan ialah acara pengembangan sistem pada bidang perpajakan khususnya pada bidang administrasi yang dilakukan sang instansi terkait pada rangka peningkatan penerimaan pajak pada pada negeri. tata kelola emiten ialah sistem pengelolaan emiten secara profesional sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran, serta kesetaraan.

Corporate governance ialah suatu sistem yang dirancang guna mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional sesuai dengan prinsip transparan, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran serta kesetaraan. Dengan adanya penerapan good corporate governance dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan pimpinan perusahan lebih cekatan dalam mengambil keputusan yang baik, dapat meningkatkan efisiensi kegiatan operasional perusahaan, serta mempermudah diperolehnya danapembiayaan yang lebih kecil.

Penghindaran pajak (tax evasion), yakni kegiatan menghindari pajak yang tidak diperbolehkan kegiatan ini dilakukan secara sengaja atau menghindari peraturan pajak yang berlaku guna meminimalkan kewajiban perpajakannya. Dan fenomena yang banyak terjadi saat ini wajib pajak selalu berkeinginan guna dapat membayarkan pajaknya dengan sekecil-kecilnya. Perusahaan memiliki kontribusi besar terhadap proses pembayaran serta pelaporan pajak mereka terhadap pemerintahan, namun terdapat beberapa perusahaan menganggap bahwa pajak sebagai beban yang akan mengurangi laba yang mereka dapat. Hal tersebut yang membuat masih banyaknya wajib pajak badan yang enggan melakukan pelaporan pajak dan merugikan pemasukan negara.

METODE

Jenis survei yang digunakan adalah kuantitatif. Menggunakan variabel terikat penghindaran pajak serta variabel bebas yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan (X1) serta penerapan GCG (X2). Populasinya ialah jumlah wajib pajak terdaftar pada KPP Bandar Lampung 1 Pratama berjumlah 300 emiten. Sesuai populasi, maka diambil sample eksklusif memakai teknik sampling yaitu purpose

Novika Lia Syafitri[1], Syamsu Rizal[2]
DOI: https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i4.423

sample, sample dipergunakan pada survei ialah 10% dari 300 emiten. Sebagai akibatnya diperoleh 30 emiten. Asal data yang dipergunakan pada survei ialah data utama diperoleh eksklusif subjek survei melalui penyebaran kuesioner, lalu digunakannya data sekunder yaitu data diperoleh dari kepustakaan serta dokumentasi. Metode analisis data dipergunakan pada survei merupakan statistik naratif, analisis kuantitatif yang terdiri asal regresi linear terganda, koefisien hubungan, koefisien determinasi serta pengujian hipotesis memakai t serta f.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Validitasi

Table 2. Results of Validity Modernization of the Tax Administration System (X1)

Respondents	r hitung	r table	Condition	Conclusion
Respondents 1	0,773	0,361	rhitung>rtable	Tervaliditasi
Respondents 2	0,654	0,361	rhitung>rtable	Tervaliditasi
Respondents 3	0,774	0,361	rhitung>rtable	Tervaliditasi
Respondents 4	0,536	0,361	rhitung>rtable	Tervaliditasi
Respondents 5	0,632	0,361	rhitung>rtable	Tervaliditasi
Respondents 6	0,668	0,361	rhitung>rtable	Tervaliditasi

Sumber: Hasil Data Diolah Tahun 2022

Terlihat dari tabel di atas, seluruh item akuntansi terkait menggunakan modernisasi sistem administrasi perpajakan (X1) mencapai $r_{hitung} > r_{table} = 0,361$. Menggunakan demikian, seluruh item modernisasi sistem administrasi perpajakan (X1) tervalidasi.

Table 3. Results of Validity GCG (X2)

Respondents	r hitung	r table	Condition	Conclusion
Respondents 1	0,582	0,361	$r_{hitung}>r_{table}$	Tervaliditasi
Respondents 2	0,636	0,361	$r_{hitung}>r_{table}$	Tervaliditasi
Respondents 3	0,578	0,361	$r_{hitung}>r_{table}$	Tervaliditasi
Respondents 4	0,814	0,361	$r_{hitung}>r_{table}$	Tervaliditasi
Respondents 5	0,821	0,361	$r_{hitung}>r_{table}$	Tervaliditasi
Respondents 6	0,834	0,361	$r_{hitung}>r_{table}$	Tervaliditasi

Sumber: Hasil Data Diolah Tahun 2022

Dari tabel di atas dapat tercermati jika seluruh item penerapan GCG (X2) mencapai rhitung > rtable = 0,361. Menggunakan demikian, diketahui bahwa semua item implementasi GCG (X2) tervalidasi.

Table 4. Result of Validity of Illegal Tax Avoidance Variable (Y)

Respondents	r hitung	r table	Condition	Conclusion
Respondents 1	0,776	0,361	$r_{hitung} > r_{table}$	Tervaliditasi
Respondents 2	0,798	0,361	$r_{hitung} > r_{table}$	Tervaliditasi
Respondents 3	0,593	0,361	$r_{hitung} > r_{table}$	Tervaliditasi
Respondents 4	0,759	0,361	$r_{hitung} > r_{table}$	Tervaliditasi
Respondents 5	0,829	0,361	$r_{hitung} > r_{table}$	Tervaliditasi
Respondents 6	0,806	0,361	$r_{hitung} > r_{table}$	Tervaliditasi
Respondents 7	0,818	0,361	$r_{hitung} > r_{table}$	Tervaliditasi
Respondents 8	0,814	0,361	$r_{hitung} > r_{table}$	Tervaliditasi

Sumber: Hasil Data Diolah Tahun 2022

Sesuai table di atas, terlihat bahwa semua elemen pernyataan terkait penghindaran pajak ilegal (Y) mencapai akibat menggunakan total Sig rhitung > rtable. Menggunakan demikian bisa diketahui bahwa seluruh unsur penghindaran pajak ilegal (Y) dinyatakan tervalidasi.

Realibilitas

Table 5. Results of Reliability

Variable	Koefisien Cranbach Alpha	Koefisien r	Simpulan
Modernisasi Sistem AdministrasiPerpajakan	0,627	0,500	Realiable
Penerapan GCG	0,772	0,500	Realiable
Penghindaran Pajak Ilegal	0,843	0,500	Realiable

Sumber: Hasil Data Diolah Tahun 2022

Dari tabel di atas diperoleh cronbach alpha 0,627 pada realiable modernisasi sistem manajemen perpajakan (X1). Total tealiable 0,772 pada variable penerapan GCG (X2). Total realiable 0,843 pada variable penghindaran pajak ilegal (Y). Supaya bisa memenuhi kriteria konsistensi, survei bisa dikatakan realiable bila cronbach alpha (α) > 0,05. Sebagai akibatnya survei bisa dipergunakan serta dianggap.

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan pada Penghindaran Pajak Ilegal

Akibat survei buat menguji koefisien determinasi modernisasi sistem administrasi perpajakan serta GCG pada penghindaran pajak ilegal masih mempunyai dampak sangat lemah, yaitu hanya 33,2%. Sebagai akibatnya KPP Pratama Bandar Lampung 1 perlu lebih mempertinggi kinerjanya serta memfasilitasi pembaharuan sistem modernisasi perpajakan. Wajib pajak badan

DOI: https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i4.423

terdaftar perlu mulai menerapkan GCG saat menjalankan usahanya. Keadaan sinkron pada hipotesis akan memberikan adanya korelasi positive serta signifikan antara modernisasi sistem modernisasi sistem administrasi perpajakan menggunakan penghindaran pajak ilegal.

Sesuai pengujian hipotesis memakai t serta F, ditolaknya Ho serta diterimanya Ha. Skor didapatkan f 0,004 < 0,5 serta Fhitung 6,723 > Ftable 3,34. Terbentuk sig. 0,043 < 0,05 serta t hitung 2,121 > ttable2,501. Ke-2 survei menyampaikan akibat sama atau konsisten. Semakin baik skema modernisasi sistem administrasi perpajakan, akan memudahkan wajib pajak enggan melaporkan pajaknya secara eksklusif melalui KPP. Sebagai akibatnya bisa lebih efektif dalam melaporkan kewajiban perpajakannya melalui e-spt atau e-filling yang sudah disediakan oleh DJP untuk mengurangi praktik penghindaran pajak.

Penerapan GCG pada Penghindaran Pajak Ilegal

Akibat survei memberikan bahwa ada korelasi positive serta tersignifikan antara penerapan GCG pada penghindaran pajak illegal. Sesuai akibat pengujian hipotesis memakai t serta F, maka ditolaknya Ho serta diterimanya Ha. Signifikansi F 0,004 < 0,5 serta F_{hitung} 6,723 > F_{table} 3.34. Signifikansi t 0,032 < 0,05 menunjukkan signifikansi <5% serta t_{hitung} 2,266 > t_{table} 2,501. Sebagai akibatnya kedua variable tadi memperoleh akibat sama serta konsisten. Penerapan GCG berjalan baik secara terus menerus pada emiten, serta bisa meminimalisir adanya penghindaran pajak.

PENUTUP

Kesimpulan

Sesuai akibat survei serta pembahasan, maka bisa ditarik konklusi menjadi berikut:

a. Akibat survei memberikan bahwa secara empiris terbukti bahwa penghindaran pajak ilegal terpengaruhi pada penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Hal tadi bisa dicermati serta ditunjukkan dimana korelasi positive serta tersignifikansi antara penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan menggunakan penghindaran pajak illegal.
b. Akibat survei memberikan bahwa ada bukti realitas bahwa penghindaran pajak ilegal terpengaruhi secara positive serta tersignifikansi pada terapan GCG.

Saran

Adapun saran dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

a. Dari survei, terlihat bahwa penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan pada KPP Bandar Lampung 1 Pratama terdampak signifikansi pada penghindaran pajak ilegal. Sebab itu, KPP Pratama Bandar Lampung 1 harus terus membina serta mensosialisasikan kemajuan modernisasi sistem

pengelolaan perpajakan pada hal pelaporan e-spt serta e-filing melalui peningkatan pelayanan prima. Sebagai akibatnya terdampak positive pada pengurangan penghindaran pajak oleh wajib pajak.

b. Mekanisme penggunaan sistem modernisasi administrasi perpajakan e-spt serta e- filling harus disederhanakan supaya wajib pajak bisa menggunakannya dengan praktis serta memahami sistem modernisasi administrasi. Sehingga dapat membantu wajib pajak serta meminimalkan penghindaran pajak illegal.
c. Wajib pajak badan harus terus menaikkan penerapan GCG pada pengelolaan usahanya. Sebagai akibatnya harus lebih transparan serta akuntable pada pelaporan kewajiban perpajakannya serta tak melakukan penggelapan pajak secara ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

Agoes, Sukrisno serta Ardana, I Cenik. (2014). etika usaha serta profesional. Jakarta: Salemba Empat Alfina, Analisis Regresi pada Riset Ekonomi dan Manajemen: Dilengkapi menggunakan software SPSS serta EVIEWS. PT Rajagrafindo Persada, Depok.

Anshori, M., & Iswati, S. (2019). Metodologi Survei Kuantitatif: Edisi 1. Airlangga University Press. Tempat kerja Pelayanan Pajak Bandar Lampung 1.

Mardiasmo. (2016). Perpajakan, edisi revisi 2016. Yogyakarta: ANDI

Monalika, HP, & Haninun, H. (2020). Dampak Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib Pajak: Studi perkara di KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung. Jurnal Akuntansi, Keuangan serta Manajemen, 1(dua), 135-154.

Oktavia, V., Jefri, U., & Kusuma, J.W. (2020). Dampak Good Corporate Governance serta ukuran Emiten Terhadap Penghindaran Pajak. Jurnal Pendapatan: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, 1(dua), 143-151.

Owen De Pinto Simanjuntak, HE (2021). akibat kinerja keuangan serta tata kelola emiten yang baik (GCG). Jurnal Tekesnos Vol tiga No. 1 Mei 2021. kiprah Direksi dan Komite Audit dalam Penerapan tata Kelola Emiten Jilid II Jakarta: gambaran Graha.

Puspita, D. & Febrianti, M. (2017). Faktor mensugesti penghindaran pajak di emiten manufaktur pada Bursa efek Indonesia. Jurnal usaha serta Akuntansi, 19(1), 38- 46.

Rizal, S., Sari, N.F., & Haninun, H. (2012). Pemahaman manajemen terhadap peraturan perpajakan terkait kepatuhan wajib pajak badan (studi perkara pada KPP Tanjung Karang). Jurnal Akuntansi serta Keuangan, tiga (1).

Sarunan, WK (2016). Akibat Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap wajib Pajak serta Kepatuhan Emiten di KPP Pratama Manado. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, usaha serta Akuntansi, 3(4).

Sriyana, Jaka. (2014). Metode regresi buat data panel. Ekosiana, Yogyakarta.

DOI: https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i4.423

Sugiyono. (2013). Contoh survei pendidikan Pendekatan kuantitatif, kualitatif serta RdanD. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. (2014). Contoh survei pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, serta RdanD. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. (2015). Contoh Survei Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif serta RdanD) Penerbit CV. Alfabeta: Bandung

Sugiyono. (2016). Contoh Survei Kuantitatif, Kualitatif serta RdanD. Bandung: PT Alfabet. Sugiyono. (2017). Contoh Survei Kuantitatif, Kualitatif, serta RdanD. Bandung: Alfabeta, CV